

BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan, yaitu:

1. *Balanced scorecard* yang selama ini hanya digunakan pada organisasi bisnis ternyata setelah dilakukan modifikasi maka dapat digunakan pada organisasi publik. Modifikasi tersebut antara lain adalah dalam hal visi dan misi organisasi publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bagian lain yang perlu dimodifikasi adalah posisi antara perspektif finansial dan perspektif pelanggan. Selanjutnya perspektif *customers* diubah menjadi perspektif *customers* dan *stakeholders* dan perspektif *learning* dan *growth* menjadi perspektif *employess* dan *organization capacity*. Sehingga dalam hal ini *balanced scorecard* sangat bermanfaat sebagai alat pengukuran kinerja bagi Dinas Pertambangan dan Energi.
2. *Balanced scorecard* tidak hanya sebagai alat pengukuran kinerja semata tetapi juga sebagai suatu manajemen strategis dan alat komunikasi. Karena *balanced scorecard* merupakan suatu sistem manajemen yang terintegrasi dengan visi, misi dan nilai-nilai dari organisasi.

3. Dengan menerapkan *balanced scorecard* secara tepat dan benar maka visi dan misi dari Dinas Pertambangan dan Energi akan tercapai, karena didalam *balanced scorecard* semua aspek atau perspektif diperhitungkan secara proporsional.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Jangka waktu pengamatan penelitian dan pengumpulan data hanya satu minggu, sehingga kurang menggambarkan kondisi organisasi dalam jangka panjang.
2. Pengukuran kinerja pada penelitian ini hanya mendasarkan pada indikator-indikator yang terbatas yaitu pada tersedianya data, survey dan tanya jawab yang dilakukan.

5.3 Saran

Dari simpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Toraja apabila ingin menerapkan *balanced scorecard* untuk tahun anggaran 2011-2015, yaitu:

1. Dalam hal dinamika penerapan *balanced scorecard*, maka penulis menyarankan penyebarluasan *balanced scorecard* dilakukan terhitung sejak tahun 2009-2010. karena penyebarluasan harus dilakukan secara bertahap dari manajemen puncak sampai ke personel.

2. Pada perspektif *customers* dan *stake holders* program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan rekanan harus lebih diperbanyak sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Selain itu guna pelayanan kepada masyarakat meningkat, maka Dinas Pertambangan dan Energi harus melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum secara merata dan tepat sasaran.
3. Pada perspektif *internal business process* penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan untuk menunjang kegiatan operasional harus menjadi perhatian utama oleh Dinas Pertambangan dan Energi karena hal ini sangat mempengaruhi proses kerja dari aparatur dan yang akan berdampak pada peningkatan perspektif *customers* dan *stake holders*.
4. Pada perspektif *financial* yang harus diperhatikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah usulan rancangan anggaran dan realisasinya supaya benar-benar lebih efektif dan efisien, dalam hal ini penulis menyarankan dilakukan pemeriksaan atau pengauditan oleh pihak yang independen secara berkala terhadap laporan keuangan atau laporan realisasi anggaran dari Dinas Pertambangan dan Energi.
5. Pada perspektif *employess* dan *organization capacity* yang harus menjadi perhatian utama dari Dinas Pertambangan dan Energi adalah meningkatkan sumber atau akses informasi bagi aparatur, seperti tersedianya fasilitas komputer yang cukup.

6. Apabila Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Toraja telah menerapkan *balanced scorecard* sebagai alat ukur kinerjanya, maka untuk tindak lanjutnya penulis menyarankan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penilaian tingkat keberhasilan pengukuran kinerja yang menggunakan metode *balanced scorecard* yang diterapkan pada organisasi publik. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *balanced scorecard* yang selama ini hanya diterapkan pada organisasi bisnis benar-benar bisa diterapkna pada organisasi publik, secara khusus pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Toraja.